

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOMITMEN
ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

*(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Solok Selatan)*

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :
MAYANG WULANDARI
14043121

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan)

Nama : Mayang Wulandari

NIM/TM : 14043121/2014

Jurusan : Akuntansi

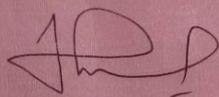
Keahlian : Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, 14 Agustus 2018

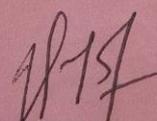
Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak
NIP: 19771123 200312 1 003

Pembimbing II



Nayang Helmayunita, SE, M.Sc
NIP: 19860127 200812 2 001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP: 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan)

Nama : Mayang Wulandari

NIM/TM : 14043121/2014

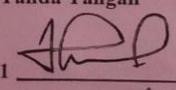
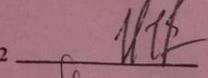
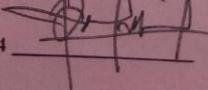
Jurusan : Akuntansi

Keahlian : Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, 14 Agustus 2018

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	1 
2	Sekretaris	Nayang Helmayunita, SE, M.Sc	2 
3	Anggota	Charoline Cheisviyanny, SE, M.AK.	3 
4	Anggota	Halmawati, SE, M.Si	4 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mayang Wulandari
NIM/TM : 14043121/2014
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Cendrawasih, Tekukur 22A1, Kelurahan Air Tawar Barat,
Kecamatan Padang utara, Sumatera Barat.
No. Hp/Telp : 081266315734
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan
Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi
Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan)

Dengan ini menyatakan :

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan, dan penilaian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan mencantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis ini sah apabila telah di tanda tangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji, dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana yang diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 14 Agustus 2018
Yang Menyatakan



Mayang Wulandari
Nim: 14043121

ABSTRAK

Mayang Wulandari (14043121). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. (*Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan*)

**Pembimbing : 1. Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak
2. Nayang Helmayunita, SE, M.Sc**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia, terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD Kabupaten Solok Selatan yaitu sebanyak 28 SKPD dengan 109 responden. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *total sampling*. Metode analisis dilakukan menggunakan MRA (*Moderated Regression Analysis*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah yang dimoderasi oleh komitmen organisasi, dan kompetensi sumber daya manusia yang dimoderasi oleh komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan.

Kata kunci : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

This study aims to see the effect of the application of government accounting standards and human resource competencies, to the quality of local government financial statements with organizational commitment as a moderating variable. The population in this study is all SKPD South Solok Regency that is as much as 28 SKPD with 109 respondents. The sample in this study uses total sampling technique. The analysis method was done using MRA (Moderated Regression Analysis). The results of this study indicate that the application of government accounting standards affects the quality of local government financial reports. competency of human resources, the application of government accounting standards moderated by organizational commitment, and the competence of human resources moderated by organizational commitment does not affect the quality of the financial statements of the local government of South Solok Regency.

Keywords: Application of Government Accounting Standards, Human Resource Competencies, Organizational Commitment, Quality of Local Government Financial Reports.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah menganugerahkan kekuatan lahir dan batin, petunjuk serta keridhoan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi”**.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, perkenalkan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku pembimbing I dan Ibu Nayang Helmayunita, SE, M.Sc selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan transfer ilmu kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Penguji ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak dan ibu Halmawati, SE, M.Si
3. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak dan Bapak Henri Agustin SE, M.Sc, Ak selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Bapak Drs. Idris, M.Si serta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibuk Mayar Afriyenti, SE, M.Sc selaku dosen Penasehat Akademik (PA).
6. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis melakukan perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha yang memberikan kelancaran serta Bapak dan Ibu Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang memberikan penulis kemudahan dan mendapatkan bahan bacaan.
8. Bapak dan Ibu Staf Karyawan SKPD Kota Sungai Penuh yang telah membantu kelancaran bagi penulis dalam mendapatkan data yang dibutuhkan bagi penyelesaian skripsi ini.
9. Teristimewa penulis persembahkan kepada Seluruh keluarga besar tercinta yang telah memberikan kasih sayang, do'a, perhatian, semangat, dorongan dan pengorbanan baik moril maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
10. Teman seperjuangan "Parmed" Dian yustika, Intan Marthalina, Yosy Aisyinta, Natasha Riandhini Halim, Khalida Shuha, Erfa Rezi Septia, Novita Anggraini, dan Putri Aisyah yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran, serta dukungan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman kost tercinta (Masnah Rahayu, Tania Rozanti, Hosni Zulfi, Harmila, dan mila fadila) teman-teman angkatan 2014 Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang, (Gustiman Candra, Adib, wilda Destikarinda, Isma Delita, Nia Permata Sari, Yola Jastika dan bima dwi darma)

12. Serta semua pihak yang telah ikut membantu dan memberikan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang Bapak/Ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padang, 14 Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori.....	10
1. Teori Agensi.....	10
2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	10
3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	18
4. Kompetensi Sumber Daya Manusia	22
5. Komitmen Organisasi.....	24
B. Kerangka Konseptual	29
C. Hubungan Antar Variabel	29
1. Pengaruh Penerapan SAP terhadap Kualitas LKPD	29
2. Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kualitas LKPD	31
3. Pengaruh Penerapan SAP Terhadap Kualitas LKPD Dengan Komitmen Organisasi sebagai pemoderasi	33
4. Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kualitas LKPD Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi.....	35
D. Hipotesis.....	36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Populasi dan Sampel	37
C. Jenis dan Sumber Data	39
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Variabel Penelitian	40
F. Pengukuran Variabel	40
G. Instrumen Penelitian.....	41
H. Model dan Teknik Analisis Data.....	42
1. Uji Kualitas Data	42
a. Uji Validitas	42
b. Uji Reliabilitas	42
2. Pengujian Asumsi Klasik	43
a. Uji Normalitas	43
b. Uji Multikolonieritas	44
c. Uji Heterokedastisitas	44
3. Teknik Analisis Data	44
a. Analisis Deskriptif	44
b. Metode Analisis Data	46
1) Uji Regresi MRA	46
2) Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	46
c. Uji Hipotesis	47
1) Uji F (F-Test)	47
2) Uji t (t-test)	48
d. Defenisi Operasional	48

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	50
B. Demografi Responden.....	50

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	51
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	51
3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	52
4. Karakteristik Responden Berdasarkan pendidikan terakhir ...	53
5. Karakteristik Responden Berdasarkan Bidang Keahlian	54
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	55
7. Karakteristik Reponden Berdasarkan Jabatan Sebelumnya...	56
C. Deskripsi Variabel Penelitian	57
E. Statistik Deskriptif.....	66
F. Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian	66
G. Uji Asumsi Klasik	68
H. Analisis Data	72
I. Pembahasan	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
C. Keterbatasan Penelitian	86

DAFTAR PUSTAKA	87
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	91
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Daftar Kantor SKPD Kabupaten Solok Selatan	37
Tabel 3.2 Skala Pengukuran	41
Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Penelitian	41
Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner	50
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	51
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	51
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	52
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	53
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan bidang keahlian	54
Tabel 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	55
Tabel 4.8 Karakteristik Responden Berdasarkan jabatan sebelumnya.....	56
Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Skor Variabel PSAP	57
Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Skor Variabel KSDM	60
Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Skor Variabel Komitmen Organisasi.....	62
Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Skor Variabel Kualitas LKPD	64
Tabel 4.13 Descriptive Statistics	66
Tabel 4.14 <i>Corrected Item-total Correlated terendah</i>	67
Tabel 4.15 <i>Cronbach's Alpha</i>	68
Tabel 4.16 Uji Normalitas	69
Tabel 4.17 Uji Multikolonieritas	70
Tabel 4.18 Uji Heteroskedastisitas	71
Tabel 4.19 Koefisien Regresi MRA	72
Tabel 4.20 Koefisien Regresi Determinasi.....	74
Tabel 4.21 Uji F.....	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	29

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner	91
Lampiran 2 Tabulasi Data Penelitian	96
Lampiran 3 Uji Validitas Penelitian	110
Lampiran 4 Uji Reliabilitas Penelitian	115
Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik.....	116
Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ekonomi.....	118
Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP	119
Bukti Penelitian dari SKPD se-Kabupaten Solok Selatan.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi semakin meningkatkan tuntutan masyarakat atas pemerintah yang baik. Upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

Menurut Prasetya (2005) Laporan keuangan adalah suatu alat pertanggungjawaban atas kinerja keuangan manajemen suatu pemerintahan kepada publik yang dipercayakan kepadanya. Tujuan umum laporan keuangan pemerintah daerah adalah memberikan informasi mengenai kinerja posisi keuangan dan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pemerintah harus memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan tingkat karakteristik yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dikatakan baik apabila disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan. Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi

keuangan daerah oleh pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintahan yang sudah menerapkan standar akuntansi pemerintahan harus memenuhi karakteristik kualitatif yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, sebagaimana disyaratkan Standar Akuntansi Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat di pahami.

Relevan disini maksudnya yaitu informasi yang disajikan didalam laporan keuangan memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), tepat waktu, dan lengkap. Andal maksudnya adalah laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian menyesatkan, penyajiannya jujur, dapat diverifikasi dan netralisasi. Kemudian dapat dibandingkan maksudnya yaitu laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat dijadikan sebagai penilaian kinerja. Dan yang terakhir yaitu dapat dipahami yaitu laporan keuangan yang disajikan dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya, faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Marwansyah (2012) mendefinisikan sumber daya manusia yang kompeten adalah sumber utama keunggulan organisasi dalam menjalankan aktivitas penyediaan barang atau jasa berkualitas tinggi dalam hidupnya. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang berupa

pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Jika kompetensi sumber daya manusianya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka akan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan.

Selain kompetensi Sumber Daya Manusia, salah satu faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja, dimana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi kerja serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi (Pramita dan Andriyani, 2010). Komitmen organisasi memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Seseorang yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi akan menunjukkan kesediaan untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan berusaha keras mencapai tujuan organisasi.

Setiap tahunnya laporan keuangan Pemerintah Daerah diperiksa dan memperoleh penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Pemeriksaan atas LKPD bertujuan memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD berdasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Beberapa tahun terakhir

pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sorotan berita utama dimedia terkemuka. Permasalahan yang dibahas berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dipublikasikan kepada publik. Pada umumnya, informasi yang disampaikan relatif positif namun pernyataan pemerintah melalui media masih mengisyaratkan adanya masalah yang terkait dengan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Seperti permasalahan yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan No. 19/LHP/XVIII.PDG/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2012-2016. bahwa pemerintah daerah kabupaten Solok Selatan memperoleh opini audit WDP berturut-turut selama 4 tahun yaitu tahun 2012-2015 hal ini disebabkan karena adanya kelemahan sistem pengendalian intern, ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan permasalahan aset limphan dari Kabupaten induk. Selain itu nama ruas jalan di Solok Selatan yang rancu dan selalu berganti setiap tahun sehingga jadi temuan BPK.

Pada tahun 2016 Pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan, mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah dari BPK untuk pertama kalinya. Predikat WTP ini merupakan wujud komitmen, tekad, semangat, dan kerja sama serta kerja keras dari seluruh jajaran DPRD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menciptakan sistem pegelolaan keuangan dan aset yang mampu melaksanakan dengan baik. Meskipun mendapat predikat WTP LAKIP Kabupaten

Solok Selatan masih mendapat nilai C plus dan 2018 harus bisa ditingkatkan lagi (www.solselkab.go.id).

Permasalahan mendasar yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten solok selatan dan harus dibenahi yaitu dalam hal kompetensi sumber daya manusia. Baru-baru ini pemerintah kabupaten Solok Selatan melakukan evaluasi bagi pejabat yang belum sesuai kemampuannya dengan jabatan yang dipegangnya. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kinerja dan menempatkan pejabat sesuai kemampuannya (www.solselkab.go.id).

Beberapa penelitian menemukan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi pemerintahan. Hasil dari beberapa penelitian menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Seperti penelitian Sako (2018) dengan judul penelitian pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Gorontalo hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fikri, dkk (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Selanjutnya penelitian mengenai Sumber Daya Manusia yang dilakukan oleh Lasmara (2016) pada SKPD Kabupaten Kerinci dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Kompetensi Sumber daya Manusia, Perangkat Pendukung dan Peran

Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci. Wati, dkk (2014) melakukan penelitian di Kabupaten Buleleng dengan Judul penelitian Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem Akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan daerah pada SKPD Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah,

Zeyn (2011) dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* terhadap kualitas laporan keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Moderasi. Rahmawati (2015) meneliti tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. Menemukan bahwa komitmen organisasi secara signifikan memoderasi tidak berpengaruh terhadap SDM. Senada dengan itu Siwambudi, dkk (2017) menemukan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan interaksi komitmen organisasi dengan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari beberapa uraian diatas dapat dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun faktor-faktor tersebut dapat lebih berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan apabila diperkuat dengan variabel moderasi, yaitu komitmen organisasi, faktor-faktor tersebut dapat menjadi lebih berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan apabila, seorang aparat pemerintah yang punya komitmen terhadap organisasinya untuk lebih memajukan dan meningkatkan kinerja dari organisasinya berasal, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhinya tersebut dapat lebih bermanfaat, berguna, serta menjadikan laporan keuangan lebih berkualitas.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada tempat penelitian, dan tahun penelitian. Ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya dan terkait dengan permasalahan yang terjadi dipemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ulang kepada variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penulis juga ingin menguji kembali apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel Moderasi memang dapat mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan responden dan tempat penelitian yang berbeda.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Solok Selatan dengan judul penelitian **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia**

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moederasi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka disusunlah perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Bagaimana pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Bagaimana pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi?
4. Bagaimana pengaruh Komptensi Sumber Daya manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi
4. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dibidang Sektor Publik khususnya mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas laporan keuangan.

3. Bagi akademik

Dapat dijadikan referensi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Teori Agensi

Teori agensi didefinisikan sebagai suatu hubungan yang terdapat pada suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal, Jensen dan Meckling dalam Syarifusin (2014). Sedangkan menurut Rosalin (dalam prasetyo, 2015) hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (*agency relationship*).

Jadi, dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam hubungan keagenan, pemerintah sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipalnya.

2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

a. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Menurut Bastian (2010) Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mendefinisikan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode” .

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan suatu laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama suatu periode.

b. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- 1) menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- 2) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Menurut Bastian (2010) secara spesifik tujuan pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi mengenai sumber yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan dengan cara :

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
- 2) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- 3) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya.
- 4) Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi.
- 5) Menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

c. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pokok terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai anggaran dan realisasi mengenai pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai akuntabilitas, alokasi sumber-sumber daya ekonomi dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi sebagai berikut:

- a) Informasi mengenai sumber, alokasi, ekonomi dan penggunaan sumber daya ekonomi
- b) Informasi mengenai Realisasi Anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan perubahan SAL bertujuan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam catatan atas laporan keuangan. Struktur LP-SAL baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota tidak memiliki perbedaan.

3) Neraca

Neraca atau laporan posisi keuangan Adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva,utang, dan modal pemilik selama periode tertentu. Dalam neraca setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar, serta mengklasifikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

4) Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. LO disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunaiketerkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

5) Laporan Arus Kas (LAK)

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Tujuan LAK dan setara kas adalah ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas informasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada resiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu suatu investasi disebut dengan setara kas kalau investasi tersebut mempunyai masa jatuh tempo 3 bulan atau kurang dari tanggal periode.

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Misalnya:

- a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya
- b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap

7) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

CALK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari jangka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. CALK mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk mengungkapkan didalam SAP serta ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

d. Karakteristik Kualitatif LKPD

Menurut Soemarso (2010) laporan keuangan yang berkualitas harus didukung oleh indikator relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dapat dibandingkan (*comparability*), tepat waktu (*timeliness*) dan dapat dipahami (*understandability*). Menurut PP Nomor 71 tahun 2010 Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan

prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

1) Relevan.

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan yaitu:

a) Memiliki Manfaat Umpan Balik (*Feedback Value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi dimasa lalu.

b) Memiliki Manfaat Prediktif (*Predictive Value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat waktu (*Timeliness*)

Informasi dikatakan tepat waktu apabila informasi tersedia pada waktu para pengambil keputusan menggunakannya untuk membuat keputusan. Informasi digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan perusahaan dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan maka dari itu informasi harus disampaikan secepat mungkin. Informasi mempunyai nilai tinggi jika informasi tersebut tidak basi.

d) Lengkap

Informasi yang disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan

2) Andal.

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Informasi yang handal memenuhi karakteristik:

a) Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali dari pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralisasi

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat dibandingkan.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan bisa dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal yaitu dapat dilakukan bila suatu entitas

merupakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ketahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan dapat menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang diterapkan sekarang, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4) Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh pengguna merupakan kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi. Informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikekuarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pengguna tertentu.

3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Defenisi Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang berbunyi: “Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Senada dengan itu menurut Mardiasmo (2002) standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan

kepada para pengguna laporan keuangan. Sedangkan menurut Menurut Wijaya (2008), standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia.

Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Dengan demikian, SAP merupakan prasyarat yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia, Indra Bastian (2010:138). Hal ini ditunjukkan dengan Lahirnya standar akuntansi (SAP) telah membuat perubahan hebat terhadap pola pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah merupakan hasil dari proses akuntansi yang diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah harus disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. standar akuntansi pemerintahan dijadikan sebagai acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan baik laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga laporan keuangan tersebut menghasilkan informasi yang berkualitas.

b. Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut fakhrurazi (2010) manfaat yang akan didapat dengan adanya standar akuntansi pemerintahan yaitu:

1) Akuntabilitas

Laporan keuangan yang dihasilkan dapat mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pelaksanaan sumber daya dalam mencapai tujuan. Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, lewat media pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala.

2) Manajemen

Dapat mempermudah fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah. Manajemen adalah ilmu seni yang mengatur proses pemanfaatan SDM dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, manajemen akan berguna untuk mengevaluasi pelaksanaan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan serta pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang terbuka jujur dan menyeluruh kepada *stakeholders*. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan antar generasi

Dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Keseimbangan antar generasi bertujuan untuk membantu para pengguna untuk mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

c. **Basis Akuntansi Pemerintah**

Menurut Mustofa, (2008) Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kenapa pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi ini berhubungan dengan waktu kapan pengakuan dilakukan pada umumnya Basis akuntansi sama-sama digunakan dalam menyajikan laporan keuangan. Ada dua jenis yaitu basis kas dan basis akrual. Menurut Nordiawan (2006) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan harus mengacu kepada standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Standar tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan di atas Standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang akuntabel dan transparan. Dengan demikian

penerapan SAP mewajibkan bagi setiap entitas pelapor yakni pemerintah daerah untuk melaporkan upaya yang telah dilaksanakan serta hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja. Dengan adanya penerapan SAP akan dapat disusun laporan keuangan yang bermanfaat. Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermanfaat dan bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada SAP.

4. Kompetensi Sumber Daya Manusia

a. Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Sebagaimana telah diungkapkan, sumber daya manusia yang kompeten adalah sumber utama keunggulan organisasi dalam menjalankan aktivitas penyediaan barang atau jasa berkualitas tinggi dalam hidupnya (Marwansyah, 2012). Sudarmanto (2009) menjelaskan bahwa Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut.

Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk melaksanakan, merencanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Secara etimologi kompetensi diartikan sebagai dimensi keahlian atau keunggulan seorang pemimpin atau staf yang mempunyai ketrampilan, keunggulan

dan perilaku yang baik dalam pekerjaannya (Sutrisno, 2009). Sedangkan menurut Spencer dan Spencer dalam Sutrisno (2009) juga mendefinisikan bahwa kompetensi adalah sesuatu yang mendasari karakteristik dari individu yang dihubungkan dengan hasil yang diperoleh dalam suatu pekerjaan.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Sipil No. 46 A tahun 2003 tentang pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan structural Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

b. Komponen Kompetensi

Hutapea dan Thoha (2008) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi untuk dapat dijadikan indikator mengukur kompetensi yaitu:

1) Pengetahuan

Informasi yang dimiliki seseorang karyawan/Pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu). Ilmu atau informasi yang dimiliki seorang pegawai dapat digunakan dalam kondisi nyata dalam suatu pekerjaan. Pengetahuan pegawai turut menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai yang mempunyai pengetahuan yang cukup meningkatkan efisiensi perusahaan.

2) Keterampilan,

Suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan atau organisasi kepada seorang karyawan atau pegawai dengan baik dan maksimal, misalnya ketrampilan bekerjasama dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu atau kelompok. Keterampilan ini sangat diperlukan bagi pegawai yang sudah menduduki jabatan tertentu karena jabatan ini sangat berpengaruh dalam berkomunikasi, memotivasi, dan mendelegasi.

3) Sikap

Pola tingkah laku seorang karyawan/pegawai di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Apabila pegawai mempunyai sifat mendukung pencapaian organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan sebaik-baiknya.

5. **Komitmen Organisasi**

a. **Pengertian Komitmen Organisasi**

Ikhsan dan Isaac (2008) mendefinisikan Komitmen organisasi merupakan tingkat sejauh mana seorang pegawai memihak kepada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Sedangkan Menurut Robbins dan Judge (2007) komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi.

Komitmen organisasional dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Jika pekerja merasa jiwanya

terikat dengan nilai-nilai organisasional yang ada maka dia akan merasa senang dalam bekerja, sehingga mempunyai tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasi dan termotivasi melaporkan semua aktivitas dengan melaksanakan akuntabilitas kepada publik secara sukarela termasuk akuntabilitas keuangannya melalui laporan keuangan.

Komitmen dibutuhkan oleh organisasi agar sumber daya manusia yang kompeten dalam organisasi dapat terjaga dan terpelihara dengan baik. Komitmen organisasi dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi, dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Hal ini disebabkan pegawai dengan komitmen organisasi yang tinggi akan mampu mencapai kinerja yang tinggi serta menunjukkan dedikasi dan dukungan yang kuat dalam pencapaian tujuan organisasi (Arnie 2011).

Komitmen organisasional menunjukkan suatu daya seseorang dalam keterlibatannya dalam suatu bagian organisasi. Komitmen organisasional akan menimbulkan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) bagi pegawai, karena dengan jiwa yang telah terikat dengan organisasinya yang dimiliki oleh pegawai, maka dia akan merasa senang dan memiliki loyalitas tinggi dalam bekerja dan termotivasi melaporkan semua aktivitas akuntansi dengan penuh tanggung jawab dan sukarela.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi adalah suatu kepercayaan, kemauan, keinginan dan penerimaan yang kuat untuk tercapainya tujuan dan nilai-nilai organisasi, mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi dan mempertahankan kedudukan sebagai anggota organisasi.

b. Komponen Komitmen Organisasi

Menurut Allen dan Meyer (dalam Sutrisno, 2010) Komponen komitmen organisasi adalah sebagai berikut:

1) Komponen afektif (*affective commitment*)

Komitmen afektif berkaitan dengan Perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya. Komitmen dalam jenis ini muncul dan berkembang oleh dorongan adanya kenyamanan, keamanan, dan manfaat lain yang dirasakan dalam suatu organisasi dan tidak diperoleh dari tempat organisasi lain.

Terdapat tiga karakteristik komitmen afektif yaitu:

a) Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi yang memengaruhi perkembangan komitmen afektif adalah sistem desentralisasi adanya kebijakan organisasi yang adil, dan cara menyampaikan kebijakan organisasi kepada individu.

b) Karakteristik Individu

Terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa gender memengaruhi komitmen afektif, namun ada pula yang menyatakan tidak demikian. Usia juga dapat mempengaruhi proses terbentuknya komitmen afektif, meskipun tergantung dari kondisi individu itu sendiri. Selain itu juga terdapat jabatan organisasi, status pernikahan, tingkat pendidikan, kebutuhan akan berprestasi, etos kerja, dan persepsi individu mengenai kompetensinya.

c) Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja individu yang memengaruhi proses terbentuknya komitmen efektif salah satunya antara lain lingkup kerja, yaitu beberapa karakteristik

yang menunjukkan kepuasan dan motivasi individu. Hal ini mencakup tantangan dalam pekerjaan, tingkat otonomi individu, dan variasi kemampuan yang digunakan individu. Selain itu peran individu dalam organisasi tersebut dan hubungannya dengan atasannya.

2) Komponen normatif (*normative commitment*)

Perasaan karyawan tentang kewajiban yang harus diberikan kepada organisasinya. Hal ini berkaitan dengan sesuatu yang mendorong anggota untuk tetap berada dan memberikan sumbangan pada keberadaan suatu organisasi baik materi maupun non materi, adalah kewajiban moral yang mana seseorang akan merasa bersalah dan tidak nyaman jika tidak melakukan sesuatu. Komitmen normatif terhadap organisasi dapat berkembang dari sejumlah tekanan yang dirasakan individu selama proses sosialisasi, selama sosialisasi saat individu baru masuk ke dalam organisasi. Komitmen normatif juga dapat berkembang dikarenakan organisasi- organisasi memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi individu yang tidak dapat dibalas kembali. Faktor lainnya adalah adanya kontrak psikologis antara anggota dengan organisasinya. Ketiga hal ini lebih tepat sebagai komponen atau dimensi dari komitmen organisasi, dari pada jenis-jenis komitmen berorganisasi. Hal ini disebabkan hubungan anggota organisasi dengan organisasinya yang mencerminkan perbedaan derajat ketiga dimensi komitmen tersebut.

3) Komponen berkelanjutan (*continuance commitment*)

Berkaitan dengan anggota secara psikologi pada organisasi karena biaya yang ditanggung sebagai konsekuensi keluar organisasi. Kaitannya dengan ini

anggota akan mengkalkulasi manfaat dan pengorbanan atas keterlibatan dalam anggota suatu organisasi. Anggota akan cenderung memiliki komitmen yang tinggi dalam keanggotaan jika pengorbanan akibat keluar organisasi semakin tinggi.

Komitmen kontinuan dapat berkembang karena adanya berbagai tindakan atau kejadian yang dapat meningkatkan kerugian jika meninggalkan organisasi. Beberapa tindakan atau kejadian ini dapat dibagi ke dalam dua variabel yaitu investasi dan alternatif, selain itu proses pertimbangan juga dapat mempengaruhi individu. Investasi termasuk sesuatu yang berharga, termasuk waktu, usaha, ataupun uang, yang harus individu lepaskan jika meninggalkan organisasi. Alternatif adalah kemungkinan untuk masuk ke organisasi lain. Proses pertimbangan adalah saat dimana individu mencapai kesadaran akan investasi dan alternatif, dan bagaimana dampaknya bagi mereka sendiri.

c. Jenis-jenis komitmen

1) Komitmen sikap

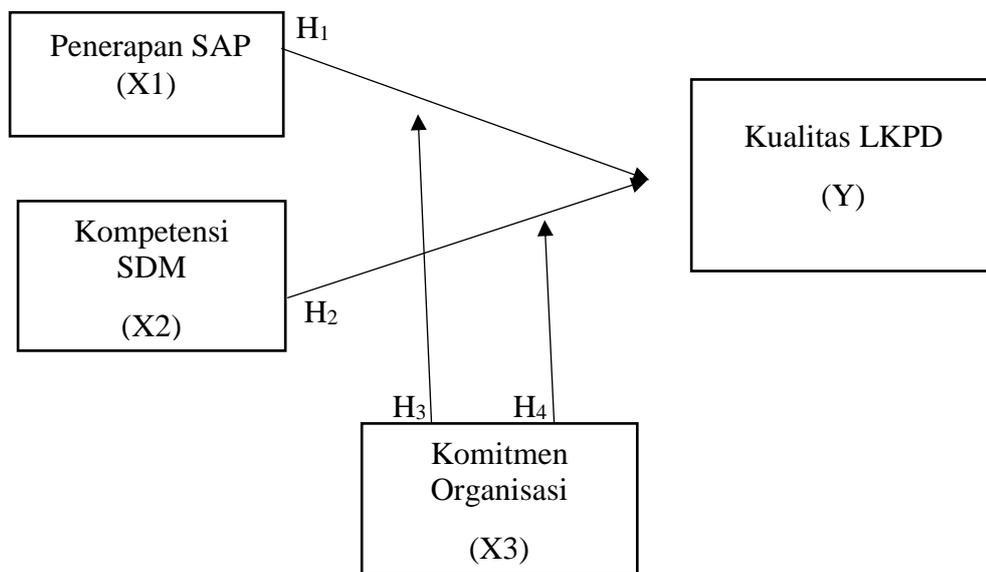
Komitmen sikap berfokus pada proses bagaimana seseorang mulai memikirkan mengenai hubungannya dalam organisasi atau menentukan sikapnya terhadap organisasi. Hal ini dapat dianggap sebagai sebuah pola pikir dimana individu memikirkan sejauh mana nilai tujuannya sendiri sesuai dengan organisasi dimana ia berada. Komitmen sikap melibatkan pengukuran terhadap komitmen dan variabel lain yang dianggap sebagai penyebab atau konsekuensi dari komitmen.

2) Komitmen perilaku

Komitmen perilaku berhubungan dengan proses dimana individu merasa terikat kepada organisasi tertentu dan bagaimana cara mereka mengatasi setiap

masalah yang dihadapi. Komitmen perilaku, melihat anggota sebagai individu yang berkomitmen terhadap tingkah laku tertentu, dan bukan hanya sebagai suatu entitas saja. Sikap atau tingkah laku yang berkembang merupakan konsekuensi komitmen terhadap tingkah laku.

B. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

C. Hubungan antar Variabel

1. Pengaruh Penerapan SAP terhadap Kualitas LKPD

Hubungan keagenan dapat digambarkan sebagai hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah berfungsi sebagai agen untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh para pengguna informasi laporan keuangan. Informasi laporan keuangan pemerintah yang disajikan harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan. Standar akuntansi pemerintahan merupakan

pedoman dalam menyusun laporan keuangan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia. Manfaat yang akan diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antar generasi.

Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan mempunyai dua pilihan, yaitu SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. Penerapan SAP berbasis akrual dalam lingkungan pemerintahan adalah untuk mengetahui seberapa besarnya biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pelayanan untuk kepentingan publik, serta menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Dengan adanya SAP berbasis akrual ini dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami untuk pengambilan suatu keputusan baik ekonomi, sosial, maupun politik.

Diharapkan dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan semuanya berjalan dengan terstruktur dan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat. Oleh karena itu pemerintah harus menerapkan dan mempraktekkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dalam rangka membentuk suatu tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Hal ini sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Bakar (2012) menemukan bahwa Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Begitu juga penelitian yang telah dilakukan oleh Oktarina (2016) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Jadi semakin bagus penerapan standar akuntansi pemerintahan yang diterapkan maka kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin meningkat.

Hipotesis pertama yang dirumuskan dari penelitian ini adalah:

H₁ : Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas LKPD

Sumber daya manusia yang kompeten merupakan faktor penentu suatu laporan keuangan. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Sipil No. 46 A tahun 2003 tentang pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan structural Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

Sumber daya manusia yang berkompeten dalam menyusun laporan keuangan harus memiliki pengetahuan yang luas yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, memiliki ketrampilan yang bagus, sikap yang baik

dan melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya sehingga memaksimalkan kemampuan yang dimilikinya demi tercapainya laporan keuangan yang berkualitas.

Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik tentu akan mampu bekerja secara optimal sehingga segala tujuan dari pemerintah daerah dapat tercapai, salah satunya menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Pemenuhan kebutuhan DPR selaku *principal* dalam hal menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dapat terwujud melalui sumber daya manusia yang kompeten. Kualitas informasi di dalam laporan keuangan yang buruk akan mempersulit pengguna di dalam mengambil keputusan. Selain itu, kualitas laporan yang buruk sebagai akibat dari rendahnya kompetensi yang dimiliki oleh para pegawai di instansi pemerintah tersebut akan mengurangi kepercayaan masyarakat atas kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Senada dengan itu Karsana (2017) yang melakukan penelitian di Kabupaten Bangli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi semakin bagus kompetensi sumber daya yang dimiliki maka semakin meningkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:

H₂ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh Penerapan SAP terhadap Kualitas LKPD dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi

Standar akuntansi pemerintahan merupakan standar yang harus diikuti dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2002) standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan sebagai fondasi mengikat segala aturan dasar yang menjadi tolok ukur dalam pencatatan laporan keuangan. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah dan laporan pertanggungjawaban kinerja kepala daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan mengacu pada SAP maka diharapkan laporan keuangan pemerintahan akan dapat diperbandingkan, sehingga sangat berguna untuk penilaian kinerja pemerintah daerah.

Teori keagenan menggambarkan bahwa hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi laporan keuangan merupakan suatu hubungan keagenan. Pemerintah berfungsi sebagai agen untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Informasi yang disediakan oleh pemerintah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan. Hubungan penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan hubungan antar individu terhadap nilai-nilai organisasi serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya demi kepentingan

organisasi dan memiliki keinginan yang kuat menjadi bagian organisasinya. Meyer dan Allen (1997) mengemukakan tiga komponen mengenai komitmen organisasi, yaitu: Komitmen afektif, Komitmen kontinu, Komitmen normatif. Dari ketiga jenis komitmen tersebut, komitmen afektif adalah jenis yang paling diinginkan oleh perusahaan. Karyawan yang memiliki loyalitas, yaitu karyawan yang mempunyai komitmen afektif akan cenderung tetap tinggal (bekerja dalam perusahaan).

Komitmen organisasi dibutuhkan oleh instansi pemerintahan agar penerapan SAP yang baik dan benar dapat tercipta. Komitmen organisasi dapat memperkuat hubungan penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Hal ini dapat diterapkan apabila pegawai yang melakukannya memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi tempatnya bekerja dengan didasari oleh komitmen yang tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya (2017) menemukan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang dimoderasi oleh komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi, semakin bagus penerapan standar akuntansi pemerintahan yang dipengaruhi oleh komitmen organisasi maka meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H₃ : Komitmen Organisasi memperkuat Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4. Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas LKPD dengan Komitmen Organisasi sebagai pemoderasi

Sudarmanto (2009) menjelaskan bahwa Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan elemen terpenting dalam suatu organisasi, oleh karena itu pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Sumber daya manusia yang berkualitas, harus didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan, SDM yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

Hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap laporan keuangan pemerintahan daerah dapat dipengaruhi oleh komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan tingkat sejauh mana seorang pegawai memihak kepada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi (Ikhsan dan Isaac, 2008). Komitmen organisasi dapat memperkuat hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasinya akan berusaha meningkatkan kinerjanya dengan memaksimalkan kemampuan yang dimilikinya dan akan mendorong terwujudnya laporan keuangan pemerintahan daerah (LKPD) yang berkualitas. Namun

Sebaliknya, komitmen pegawai yang rendah cenderung mengakibatkan terjadinya penurunan kinerja dan akan memperlemah kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Siwambudi, (2017) dengan judul penelitian komitmen organisasi sebagai pemoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian interen pada kualitas laporan keuangan. Menunjukkan bahwa komitmen organisasi memperkuat pengaruh kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

H₄ : Komitmen Organisasi memperkuat pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H₂ : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H₃ : Komitmen Organisasi memperkuat pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

H₄: Komitmen Organisasi memperkuat pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah penerapan standar akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik standar akuntansi pemerintah yang diterapkan maka akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas.
2. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Solok Selatan. Hal ini dikarenakan masih banyak karyawan yang bagian keuangan atau tata usaha di SKPD yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.
3. Interaksi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang dimoderasi oleh komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya komitmen organisasi yang dimiliki pegawai dalam Penerapan standar akuntansi pemerintah sehingga pegawai yang memiliki komitmen yang rendah akan melakukan usaha yang tidak maksimal

4. Interaksi kompetensi sumber daya manusia yang dimoderasi oleh komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Hal ini disebabkan karena kurangnya fasilitas dan tunjangan hidup yang disediakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten Solok Selatan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan diharapkan untuk melakukan evaluasi bagi pejabat yang tidak sesuai kemampuannya dengan jabatan yang dipegang saat ini,
2. Pemerintah Daerah kabupaten solok selatan diharapkan secara rutin untuk memberikan pelatihan-pelatihan mengenai penyusunan laporan keuangan sesuai dengan penerapan standar akuntansi pemerintah.
3. Untuk untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sebaiknya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memilih karyawan yang memiliki latar pendidikan akuntansi sehingga paham terhadap standar dan aturan yang telah ditetapkan sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas.
4. Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

C. KETERBATASAN PENELITIAN

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Pengumpulan data melalui kuesioner dibutuhkan waktu dan tenaga yang memadai untuk mengirim ke responden terpilih. Kuesioner yang disebarkan ke setiap SKPD sebanyak 112 kuesioner, namun yang berhasil terkumpul oleh peneliti dan dapat diolah sebanyak 109 kuesioner, dikarenakan ada kuesioner yang tidak kembali dan kuesioner yang tidak lengkap diisi oleh responden
2. Peneliti telah memberikan penjelasan yang cukup detail mengenai petunjuk pengisian dan maksud dari setiap pertanyaan yang diajukan, peneliti kurang dapat mengendalikan jawaban dari responden, baik berupa pemahaman responden maupun verifikasi setiap jawaban dari responden sehingga dimungkinkan terjadinya bias dalam pengambilan keputusan penelitian. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus dengan jumlah responden yang lebih sedikit, sehingga peneliti dapat mendampingi responden dalam pengisian kuesionernya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azlim, Darwanis & Bakar, U. A. 2012. "Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh". *Jurnal Akuntansi*. Hlm. 1-14.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga..
- Darwanis, Azlim & Usman Abu Bakar. 2012. "Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Skpd Di Kota Banda Aceh". *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*.
- Desiana. 2014. "Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah".
- Fakhrurazi. 2010. Standar AkuntansiP emerintahan. *Artikel*. <http://fakhrurazypi.wordpress.com/tag/standar-akuntansi-pemerintahan/>. Diakses pada tanggal 7 September 2014.
- Fikri, dkk. 2016. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan keuangan pada SKPD Pemprov NTB". *Jurnal Ilmu Akuntansi*. Vol. 9 (1).
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19 (edisi kelima)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- <http://padang.bpk.go.id/?p=8228>
- <https://www.solselkab.go.id/post/read/1718/sdm-dan-infrastruktur-permasalahan-utama-daerah-tertinggal-di-solsel.html>
- <https://www.solselkab.go.id/post/read/2035/raih-opini-wtp-lembaran-baru-solok-selatan.html>
- Hutapea & Thoha. 2008. *Kompetensi Plus*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ikhsan, A., & Isaac, M. 2008. *Accounting behavioral*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jensen M, Meckling W. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*. Pp. 305-360.
- Juita, Yosi. 2014. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (studi kasus pada SKPD Kota Bukit Tinggi)". *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Karsana, Wayan & I Gusti Ngurah Agung Suaryana. 2017. "Pengaruh Efektivitas Penerapan SAP, Kompetensi SDM, dan Spi Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.21 (1), Hlm. 643-670.

- Kennedy, Liza Rahayu & Yuneita Anisma. 2014. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah ProviRiau (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau)". *Faculty of Economics Riau University*. Vol. 1 (2).
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Sipil No. 46 A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil. Melalui <http://www.google.com> [14/02/16].
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Lasmara, Freddi & Sri Rahayu. 2016. "Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia, Perangkat Pendukung, dan Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci". *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*
- Liana, Lie. 2009. "Penggunaan MRA Dengan Spss untuk Menguji pengaruh Variabel Moderating terhadap Hubungan antara Variabel independen dan Variabel dependen. *Jurnal teknologi informasi DINAMIK Volume XIV, No.2*
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Marwansyah. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi.
- Meyer, J. P & Allen, N. J. 1997. Commitment in the Workplace: Theory, Research and Application. *Journal of Vacation Behavior*, 14: 24-27.
- Nugraheni, P., 2008. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Vol. 13, No. 1.
- Nurillah, As Syifa & Dul Muid. 2014. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Depok". *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol. 3 (2).
- Oktarina, Mia. 2016. "Pengaruh Penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas apartur pemerintah daerah dan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan". *Journal Of Accounting, Volume 2 No.2*
- P.Robbins, Stephen & Timothy A.Judge. 2008. *Perilaku Organisasi Edisi ke-12*. Jakarta: Salemba Empat.
- PP No.8 Tahun. 2006. Diakses 12-25-2016. <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2006/8TAHUN2006PP.htm>.
- Prasetyo, A.R. 2015. "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Interen Akuntansi dan Good Corporate Governance Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan UNJA Vol.1 No.1*.

- Pujanira, Putriasri & Abdullah Taman. 2017. "Pengaruh Kompetensi Sumber daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY". *Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta Jurnal Nominal*. Vol. 6 (2).
- Rahmawati, Damini. 2015. "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia (Sdm) Dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Pemerintah Kab. Sragen)"
- Ratifah ,ifa & Mochammad Ridwan. 2012. "Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang". *Trikonomika*. Vol. 11 (1), Hlm. 29–39.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Robins SP & Judge. 2007. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sako, Umar & Felmi D. Lantowa. 2018. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo". *Journal Of Accounting Science* Vol. 2 (1)
- Sanjaya, Aditya. 2017. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Pada SKPD Kabupaten Kampar)". *Faculty of Economics Riau University*. Vol. 4 (1).
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi penelitian untuk bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Septiana, Lola. 2017. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pera Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi empiris pada SKPD Kota Sawah Lunto)". *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Siwambudi, I Gusti Ngurah, Gerianta Wirawan Yas, & I Dewa Nyoman Bandera. 2017. "Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Interen Pada Kualitas Laporan Keuangan". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Vol. 6 (1).
- Soemarso, S. R. 2010. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan pengembangan Kompetensi SDM: Teori, Dimensi Pengukuran dan Implementasi dalam organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Edy. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Syarifudin, A. 2014. "Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Interen terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen)." *Jurnal fokus bisnis, Volume 14, No 02*.
- Wati, dkk. 2014. "Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah". *Jurnal Akuntansi*. Vol. 2 (1), Hlm. 171-176.
- Wijayanti, Ratna & Nur Handayani. 2017. "Pengaruh Kompetensi SDM dan Implementasi Akuntansi AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah SKPD Pemerintah Kabupaten Madiun". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 6 (3).
- Wijaya, Heryanto, 2008. Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005) Untuk Pengelolaan Keuangan Negara yang Transparan dan Akuntanbel. *Jurnal Akuntansi/ Tahun X II No. 3*.
- www.bpk.go.id
- Zeyn, Elvira. 2011. "Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan". *Trikonomika*. Vol. 2 (2). Vol. 10 (1), Hlm. 52-60.